

Pemetaan ketimpangan pembangunan regional di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Pendekatan kuadran dan indeks Bonet

Adelheid Elisabet Loda*, Maksimilianus Paulus Jati Gamatara, Joaquina Felicia Saru, Marianus Antonius Deo Datus Banase

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: desiadelheid@gmail.com)

Abstract

Regional development disparity is a crucial issue in sustainable development, particularly in geographically fragmented regions such as East Nusa Tenggara (NTT) Province. This study analyzes development inequality across 22 regencies/municipality in NTT using 2024 GRDP per capita data, the Bonet Index, and a four-group quadrant classification based on the empirical quartiles of the index distribution. The Bonet Index is interpreted as the absolute relative deviation of a regency/municipality's GRDP per capita from the provincial GRDP per capita. The results reveal substantial cross-regional disparities. Kupang City records the largest deviation (1.67), followed by East Manggarai Regency (0.41), while Belu records the smallest value (0.04). Quartile-based classification identifies six regions in the highest-disparity group and six regions in the lowest-disparity group. The findings provide a reproducible, spatially oriented classification for identifying priority areas and support differentiated, place-based regional development policies in NTT.

Keyword: Spatial Disparity, Inequality Mapping, Bonet Index, Regional Development Typology, East Nusa Tenggara

Abstrak

Ketimpangan pembangunan regional merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya pada wilayah kepulauan dan terfragmentasi seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini menganalisis ketimpangan pembangunan pada 22 kabupaten/kota di NTT menggunakan data PDRB per kapita tahun 2024, Indeks Bonet, dan klasifikasi empat kuadran berdasarkan kuartil empiris distribusi indeks. Indeks Bonet diinterpretasikan sebagai deviasi relatif absolut PDRB per kapita kabupaten/kota terhadap PDRB per kapita provinsi. Hasil menunjukkan disparitas antarwilayah yang substansial. Kota Kupang memiliki deviasi terbesar (1,67), diikuti Kabupaten Manggarai Timur (0,41), sedangkan Kabupaten Belu memiliki nilai terendah (0,04). Klasifikasi berbasis kuartil menempatkan enam wilayah pada kelompok deviasi sangat tinggi dan enam wilayah pada kelompok rendah. Temuan ini menyediakan pemetaan yang lebih transparan dan dapat direplikasi untuk mengidentifikasi wilayah prioritas serta mendukung kebijakan pembangunan regional berbasis karakteristik wilayah (place-based policy) di NTT.

Kata Kunci: Disparitas Spasial, Pemetaan Ketimpangan, Indeks Bonet, Tipologi Pembangunan Wilayah, Nusa Tenggara Timur.

How to cite: Loda, A. E., Gamatara, M. P. J., Saru, J. F., & Banase, M. A. D. D. (2026). Pemetaan ketimpangan pembangunan regional di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Pendekatan kuadran dan indeks Bonet. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 6(2), 807–818. <https://doi.org/10.53088/jerps.v6i2.3302>



1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama setiap negara, terutama bagi negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, yang menjadi harapan adalah tercapainya pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah dalam suatu negara. Hal ini penting karena peningkatan pembangunan ekonomi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak terhadap persoalan ketimpangan antarwilayah yang masih menjadi tantangan serius dalam proses pembangunan nasional (Finuliyah & Khusaini, 2022; Azim et al., 2022; Sugiastuti & Pratama, 2022)

Ketimpangan pembangunan merupakan fenomena umum yang sering dijumpai dalam dinamika perekonomian daerah. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik demografis serta potensi sumber daya alam di masing-masing wilayah. Akibatnya, setiap daerah memiliki kapasitas yang berbeda dalam menggerakkan proses pembangunan ekonominya. Dalam setiap wilayah, biasanya terdapat kawasan yang telah berkembang (*developed region*) dan kawasan yang masih tertinggal (*underdeveloped region*) (Raharti et al., 2021).

Ketimpangan pembangunan regional merupakan isu krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama di daerah yang secara geografis terfragmentasi seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketimpangan tidak hanya tercermin pada capaian ekonomi, tetapi juga pada akses terhadap layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja (Tahir et al., 2025; Wahyudi, 2023; Ramadhani et al., 2025; Insani et al., 2025; Imsar & Zaman, 2024). Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi memiliki fungsi administrasi, perdagangan, pendidikan, dan jasa yang relatif lebih terkonsentrasi dibandingkan banyak kabupaten lain. Pada dimensi kesejahteraan, BPS mencatat persentase penduduk miskin NTT pada September 2024 sebesar 19,02 persen. Berdasarkan distribusi persentase kemiskinan antarprovinsi yang dipublikasikan BPS, angka tersebut merupakan yang kelima tertinggi secara nasional setelah Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Selatan (BPS Provinsi NTT, 2025; BPS, 2025). Kondisi tersebut menegaskan pentingnya analisis ketimpangan yang mampu menunjukkan posisi relatif setiap kabupaten/kota sebagai dasar perumusan intervensi pembangunan yang lebih terarah.

Salah satu ukuran ketimpangan regional yang dapat digunakan adalah Indeks Bonet, yang berangkat dari konsep PDRB per kapita relatif. Indeks ini mengukur besarnya deviasi relatif absolut PDRB per kapita suatu wilayah terhadap PDRB per kapita wilayah acuan. Dalam konteks NTT, wilayah acuan adalah PDRB per kapita Provinsi NTT. Nilai indeks yang mendekati nol menunjukkan bahwa PDRB per kapita kabupaten/kota relatif dekat dengan nilai provinsi, sedangkan nilai yang semakin besar menunjukkan deviasi yang semakin lebar. Pendekatan ini telah digunakan dalam kajian ketimpangan antarkabupaten/kota di NTT oleh Alfiansyah & Budyanra (2020)

serta Mbura & Ginting (2025), dengan landasan awal pada konsep disparitas pendapatan regional Bonet (2006).

Ketimpangan pembangunan regional merujuk pada perbedaan capaian pembangunan antardaerah dalam satu wilayah administratif, yang dapat dipengaruhi oleh konsentrasi aktivitas ekonomi, kapasitas fiskal, akses infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kondisi geografis (Raharti et al., 2021). Dalam penelitian ini, ketimpangan dioperasionalkan melalui Indeks Bonet: $IJB = |(PDRB \text{ per kapita kabupaten/kota} \div PDRB \text{ per kapita provinsi}) - 1|$ (Bonet, 2006; Mbura & Ginting, 2025). Karena menggunakan nilai absolut, indeks menunjukkan BESAR deviasi, bukan arah deviasi. Dengan demikian, nilai IJB yang tinggi tidak otomatis berarti suatu wilayah memiliki PDRB per kapita di atas provinsi; arah perbedaan harus ditentukan dengan membandingkan nilai PDRB per kapita kabupaten/kota dan provinsi sebelum transformasi absolut. Penafsiran ini menggantikan penggunaan ambang “indeks > 1 = dominan” yang tidak tepat untuk ukuran deviasi absolut.

Selanjutnya, pendekatan kuadran digunakan sebagai klasifikasi empat kelompok berdasarkan kuartil empiris distribusi Indeks Bonet tahun 2024. Penggunaan kuartil dipilih agar batas klasifikasi bersifat transparan, berasal langsung dari distribusi 22 observasi, dan dapat direplikasi, bukan menggunakan ambang arbitrer. Berdasarkan data 2024, kuartil pertama (Q1) sebesar 0,1275, median (Q2) sebesar 0,2350, dan kuartil ketiga (Q3) sebesar 0,3075. Kuadran I mencakup nilai di atas Q3, Kuadran II berada di atas Q2 sampai Q3, Kuadran III berada di atas Q1 sampai Q2, sedangkan Kuadran IV berada pada atau di bawah Q1. Pendekatan pengelompokan ini melengkapi studi sebelumnya yang menganalisis determinan ketimpangan atau perkembangan wilayah (Alfiansyah & Budyanra, 2020; Zasriati, 2022; Mbura & Ginting, 2025).

Namun, studi yang mengaitkan analisis kuadran pembangunan dengan nilai indeks Bonet dalam konteks ketimpangan regional di NTT masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada regresi faktor-faktor penyebab ketimpangan (Azim et al., 2022; Holivil, 2024) tanpa memetakan klasifikasi wilayah menurut tingkat ketimpangannya secara visual dan strategis. Padahal, klasifikasi kuadran dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam perumusan kebijakan pembangunan berbasis wilayah.

Penelitian ini mengisi celah analitis dengan mengintegrasikan Indeks Bonet dan klasifikasi empat kuadran berbasis kuartil untuk memetakan disparitas pembangunan kabupaten/kota di Provinsi NTT pada tahun 2024. Rumusan masalah penelitian adalah: “Bagaimana distribusi ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi NTT berdasarkan nilai Indeks Bonet dan klasifikasi kuartil tahun 2024?” Berbeda dengan penelitian yang berfokus pada estimasi pengaruh variabel makro terhadap ketimpangan, penelitian ini menekankan pemetaan posisi relatif seluruh kabupaten/kota secara transparan dan dapat direplikasi. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan klasifikasi empat kelompok berbasis kuartil atas nilai Indeks Bonet untuk mengidentifikasi wilayah prioritas intervensi pada konteks provinsi kepulauan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis tingkat deviasi pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi NTT berdasarkan Indeks Bonet tahun 2024; (2) mengklasifikasikan 22 kabupaten/kota ke dalam empat kuadran berbasis kuartil distribusi Indeks Bonet; dan (3) merumuskan arah kebijakan pembangunan yang berbeda sesuai posisi relatif setiap kelompok wilayah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah daerah menentukan prioritas intervensi. Secara akademik, penelitian menawarkan prosedur klasifikasi yang eksplisit dan dapat direplikasi untuk studi pemetaan ketimpangan regional.

2. Tinjauan Pustaka

Ketimpangan Pembangunan Regional

Ketimpangan pembangunan regional merupakan perbedaan capaian pembangunan antarwilayah yang terjadi akibat tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi, infrastruktur, layanan publik, dan kesempatan pembangunan (Ramadhani et al., 2025; Puspita & Imsar, 2025; Sabaha et al., 2025; Marpaung et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi pembangunan, ketimpangan wilayah dapat muncul karena adanya perbedaan potensi daerah, kondisi geografis, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan masing-masing wilayah dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Wilayah yang memiliki akses lebih baik terhadap pusat pemerintahan, pasar, transportasi, pendidikan, dan layanan publik cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah yang memiliki keterbatasan konektivitas dan kapasitas ekonomi. Oleh karena itu, kajian mengenai ketimpangan regional penting dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil pembangunan telah terdistribusi secara merata antarwilayah (Raharti et al., 2021).

Dalam pembangunan wilayah, teori pusat pertumbuhan menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi sering kali terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan lokasi, infrastruktur, dan fungsi pelayanan. Wilayah pusat umumnya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, sedangkan wilayah pinggiran cenderung mengalami keterlambatan pembangunan apabila efek sebaran pertumbuhan tidak berjalan optimal. Kondisi ini relevan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena artikel ini menunjukkan bahwa Kota Kupang memiliki posisi dominan sebagai pusat administrasi, perdagangan, pendidikan, dan jasa dibandingkan sebagian besar kabupaten lainnya. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di NTT tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat spasial dan struktural.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan regional adalah Indeks Bonet. Ukuran ini membandingkan PDRB per kapita kabupaten/kota dengan PDRB per kapita wilayah acuan dan mengambil nilai absolut deviasi relatifnya (Bonet, 2006; Mbura & Ginting, 2025). Oleh karena itu, Indeks Bonet tidak mengukur “kontribusi daerah terhadap total PDRB”, melainkan jarak relatif PDRB per kapita suatu daerah dari nilai provinsi. Nilai nol menunjukkan kesetaraan dengan nilai acuan, sedangkan nilai yang semakin tinggi menunjukkan perbedaan relatif yang semakin besar.

Selain menggunakan Indeks Bonet, penelitian ini menerapkan klasifikasi empat kuadran untuk memudahkan interpretasi posisi relatif kabupaten/kota. Agar klasifikasi tidak bersifat ad hoc, batas kuadran ditentukan dari kuartil empiris seluruh nilai Indeks Bonet tahun 2024. Metode ini membagi distribusi menjadi empat kelompok berdasarkan Q1, median, dan Q3, sehingga setiap batas dapat dihitung ulang dari data yang sama. Klasifikasi tersebut berfungsi sebagai alat pemetaan deskriptif dan tidak dimaksudkan sebagai pengujian signifikansi statistik.

Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, infrastruktur, pengangguran, dan struktur ekonomi lokal. Studi Raharti et al. (2021) menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia berkaitan dengan perbedaan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Loda et al. (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi NTT dipengaruhi oleh karakteristik sosial-ekonomi daerah. Temuan Mbura & Ginting (2025) juga memperkuat bahwa ketimpangan pembangunan di NTT dapat dianalisis melalui Indeks Bonet, sedangkan Adryawning dan Widiyanto (2025) menekankan pentingnya melihat hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan pembangunan.

Berdasarkan teori dan temuan tersebut, kerangka pikir penelitian ini dibangun atas dasar bahwa ketimpangan pembangunan regional di Provinsi NTT dapat dijelaskan melalui perbedaan kontribusi ekonomi antar kabupaten/kota. PDRB per kapita digunakan sebagai indikator utama untuk menggambarkan kapasitas ekonomi wilayah, kemudian dianalisis menggunakan Indeks Bonet untuk mengetahui posisi relatif masing-masing daerah. Selanjutnya, pendekatan kuadran digunakan untuk memetakan tipologi pembangunan wilayah, sehingga dapat diketahui daerah mana yang termasuk kategori tinggi, sedang tinggi, sedang rendah, dan rendah. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih tepat, khususnya untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas spasial di Provinsi NTT.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan komparatif-spasial. Unit analisis mencakup seluruh 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (21 kabupaten dan 1 kota), sehingga penelitian menggunakan pendekatan sensus. Analisis bersifat cross-sectional untuk tahun 2024 dan tidak melakukan pengujian statistik inferensial. Fokus analisis adalah menghitung deviasi relatif PDRB per kapita setiap kabupaten/kota terhadap PDRB per kapita Provinsi NTT melalui Indeks Bonet, kemudian mengelompokkannya ke dalam empat kuadran berbasis kuartil distribusi indeks.

Data yang digunakan merupakan data sekunder tahun 2024 yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPS kabupaten/kota, terutama data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB)

tahun 2024 serta PDRB per kapita Provinsi NTT sebagai nilai acuan. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi publikasi statistik dan penelusuran literatur ilmiah yang relevan. Nilai Indeks Bonet 2024 juga diverifikasi terhadap tabel perhitungan yang dipublikasikan oleh Mbura & Ginting (2025). Karena seluruh kabupaten/kota dianalisis, tidak dilakukan penarikan sampel.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Perhitungan Indeks Bonet. Untuk satu tahun observasi, Indeks Bonet dihitung dengan formula: $IJB_i = |(PDRB_{pc_i} / PDRB_{pc_{ntt}}) - 1|$, dengan IJB_i adalah Indeks Bonet kabupaten/kota ke- i , $PDRB_{pc_i}$ adalah PDRB per kapita kabupaten/kota ke- i , dan $PDRB_{pc_{ntt}}$ adalah PDRB per kapita Provinsi NTT pada tahun yang sama (Bonet, 2006; Mbura & Ginting, 2025). Nilai $IJB = 0$ menunjukkan PDRB per kapita wilayah sama dengan nilai provinsi; semakin besar IJB menunjukkan semakin besar deviasi relatif. Karena formula menggunakan nilai absolut, indeks tidak menunjukkan arah perbedaan.

Selanjutnya, klasifikasi Kuadran Ketimpangan. Setelah nilai indeks dihitung, seluruh 22 nilai IJB tahun 2024 diurutkan dan dihitung kuartilnya. Diperoleh $Q1 = 0,1275$; $Q2/\text{median} = 0,2350$; dan $Q3 = 0,3075$. Batas ini digunakan sebagai dasar klasifikasi yang sepenuhnya berbasis distribusi data. Kuadran I (Sangat Tinggi): $IJB > 0,3075$ (di atas $Q3$), Kuadran II (Tinggi): $0,2350 < IJB \leq 0,3075$ (di atas median hingga $Q3$), Kuadran III (Sedang-Rendah): $0,1275 < IJB \leq 0,2350$ (di atas $Q1$ hingga median), Kuadran IV (Rendah): $IJB \leq 0,1275$ (pada atau di bawah $Q1$). Kemudian, visualisasi dan Penyajian Data. Hasil disajikan dalam tabel lengkap 22 kabupaten/kota dan diagram empat kuadran. Penyajian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan nilai individual setiap wilayah dan memastikan pembaca dapat memverifikasi dasar klasifikasi secara langsung.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Hasil Perhitungan Indeks Bonet

Berdasarkan nilai Indeks Bonet tahun 2024, Kota Kupang memiliki nilai tertinggi sebesar 1,67. Nilai tertinggi berikutnya adalah Manggarai Timur sebesar 0,41, disusul Sumba Barat Daya 0,38, Lembata 0,35, Sumba Tengah 0,32, dan Manggarai Barat 0,31. Pada sisi lain, Belu memiliki nilai terendah sebesar 0,04, diikuti Rote Ndao 0,05 dan Ngada 0,06. Nilai tersebut harus dibaca sebagai besar deviasi relatif PDRB per kapita terhadap PDRB per kapita Provinsi NTT, bukan sebagai kontribusi terhadap total PDRB. Berdasarkan kuartil empiris, enam wilayah masuk Kuadran I (sangat tinggi), lima wilayah Kuadran II (tinggi), lima wilayah Kuadran III (sedang-rendah), dan enam wilayah Kuadran IV (rendah).

Pembagian Kuadran Ketimpangan Pembangunan di Provinsi NTT (2024)

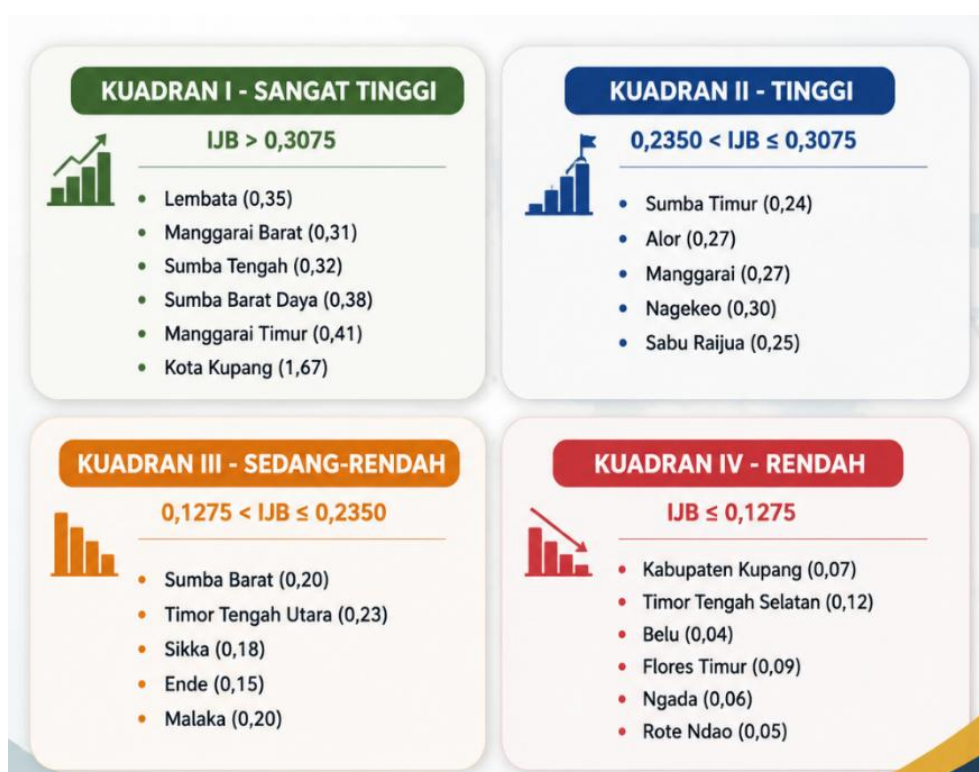
Tabel 1 menyajikan nilai Indeks Bonet individual seluruh 22 kabupaten/kota pada tahun 2024 beserta klasifikasi empat kuadran berbasis kuartil. Penyajian nilai individual ini memungkinkan verifikasi langsung terhadap posisi setiap wilayah. Hasil menunjukkan bahwa Kota Kupang memiliki nilai Indeks Bonet tertinggi sebesar 1,67, sedangkan Belu memiliki nilai terendah sebesar 0,04. Berdasarkan klasifikasi kuadran,

enam wilayah termasuk Kuadran I, lima wilayah Kuadran II, lima wilayah Kuadran III, dan enam wilayah Kuadran IV.

Tabel 1. Nilai Indeks Bonet 22 Kabupaten/Kota Pada Tahun 2024 dan Klasifikasi Empat Kuadran Berbasis Kuartil

Kabupaten/Kota	Indeks Bonet 2024	Klasifikasi Kuadran
Sumba Barat	0,20	Kuadran III (sedang-rendah)
Sumba Timur	0,24	Kuadran II (tinggi)
Kabupaten Kupang	0,07	Kuadran IV (rendah)
Timor Tengah Selatan	0,12	Kuadran IV (rendah)
Timor Tengah Utara	0,23	Kuadran III (sedang-rendah)
Belu	0,04	Kuadran IV (rendah)
Alor	0,27	Kuadran II (tinggi)
Lembata	0,35	Kuadran I (sangat tinggi)
Flores Timur	0,09	Kuadran IV (rendah)
Sikka	0,18	Kuadran III (sedang-rendah)
Ende	0,15	Kuadran III (sedang-rendah)
Ngada	0,06	Kuadran IV (rendah)
Manggarai	0,27	Kuadran II (tinggi)
Rote Ndao	0,05	Kuadran IV (rendah)
Manggarai Barat	0,31	Kuadran I (sangat tinggi)
Sumba Tengah	0,32	Kuadran I (sangat tinggi)
Sumba Barat Daya	0,38	Kuadran I (sangat tinggi)
Nagekeo	0,30	Kuadran II (tinggi)
Manggarai Timur	0,41	Kuadran I (sangat tinggi)
Sabu Raijua	0,25	Kuadran II (tinggi)
Malaka	0,20	Kuadran III (sedang-rendah)
Kota Kupang	1,67	Kuadran I (sangat tinggi)

Sumber: nilai 2024 diverifikasi dari Mbura & Ginting (2025); klasifikasi kuadran dihitung berdasarkan kuartil distribusi 22 nilai Indeks Bonet.



Gambar 1. Klasifikasi Empat Kuadran Indeks Bonet NTT Tahun 2024

4.2. Pembahasan

Ketimpangan Pembangunan Regional di Provinsi NTT

Temuan tahun 2024 menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi NTT belum merata secara spasial. Kota Kupang memiliki deviasi relatif terbesar dari nilai PDRB per kapita provinsi, yang konsisten dengan perannya sebagai pusat administrasi, perdagangan, pendidikan, dan jasa. Kuadran I juga mencakup Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Lembata, Sumba Tengah, dan Manggarai Barat. Namun, karena Indeks Bonet menggunakan nilai absolut, masuknya suatu kabupaten ke kelompok deviasi tinggi tidak dengan sendirinya berarti wilayah tersebut lebih maju daripada provinsi; sebagian wilayah dapat memiliki PDRB per kapita yang berada di bawah rata-rata provinsi tetapi berjarak relatif besar. Karena itu, interpretasi kuadran perlu dikombinasikan dengan arah selisih PDRB per kapita dan karakteristik struktural masing-masing wilayah. Pendekatan ini sejalan dengan pentingnya kebijakan berbasis tempat (*place-based development*) yang mempertimbangkan variasi kondisi lokal (Adryawning & Widiyanto, 2025).

Tingginya Ketimpangan Struktural: Dominasi Kota Kupang

Hasil analisis *cross-sectional* tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Kupang memiliki nilai Indeks Bonet tertinggi sebesar 1,67, sedangkan Manggarai Timur berada pada urutan kedua sebesar 0,41. Dengan demikian, kedua wilayah tidak memiliki nilai yang identik. Pernyataan mengenai “outlier secara konsisten pada 2021–2025” tidak digunakan dalam penelitian ini karena desain penelitian hanya menggunakan satu tahun observasi. Temuan multi-tahun tersebut merupakan hasil studi Mbura & Ginting (2025), bukan hasil analisis temporal penelitian ini. Pada tahun 2024, posisi Kota Kupang yang sangat jauh dari mayoritas kabupaten mengindikasikan konsentrasi aktivitas ekonomi perkotaan dan fasilitas pelayanan yang kuat di ibu kota provinsi, sementara kabupaten lain menunjukkan deviasi yang lebih kecil dari nilai acuan provinsi.

Kuadran II: Potensi Wilayah Pertumbuhan Baru

Wilayah Kuadran II (tinggi) berdasarkan batas $0,2350 < \text{IJB} \leq 0,3075$ adalah Nagekeo (0,30), Alor (0,27), Manggarai (0,27), Sabu Raijua (0,25), dan Sumba Timur (0,24). Kelompok ini memiliki deviasi relatif di atas median namun belum melampaui kuartil ketiga. Kebijakan pada kelompok ini perlu diarahkan pada penguatan sektor unggulan, konektivitas antarpusat produksi dan pasar, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar peningkatan aktivitas ekonomi tidak menghasilkan ketimpangan baru di dalam wilayah.

Kuadran III dan IV: Wilayah dengan Deviasi Relatif Rendah

Kuadran III (sedang-rendah) terdiri atas Timor Tengah Utara (0,23), Sumba Barat (0,20), Malaka (0,20), Sikka (0,18), dan Ende (0,15). Kuadran IV (rendah) terdiri atas Timor Tengah Selatan (0,12), Flores Timur (0,09), Kabupaten Kupang (0,07), Ngada (0,06), Rote Ndao (0,05), dan Belu (0,04). Nilai yang rendah berarti PDRB per kapita

wilayah relatif dekat dengan nilai acuan provinsi, bukan otomatis menunjukkan “wilayah tertinggal”. Karena itu, penentuan prioritas pembangunan tidak boleh hanya didasarkan pada besarnya Indeks Bonet, tetapi juga perlu mempertimbangkan level PDRB per kapita, IPM, kemiskinan, akses infrastruktur, dan struktur ekonomi lokal.

Relevansi dan Rekomendasi Kebijakan

Klasifikasi kuadran memberikan kerangka awal untuk menyusun kebijakan yang terdiferensiasi. Karena Indeks Bonet mengukur besarnya deviasi, kebijakan harus dikombinasikan dengan informasi arah deviasi dan indikator kesejahteraan lain. Prioritas utama adalah mengurangi ketergantungan pada satu pusat pertumbuhan, memperkuat keterhubungan antarpulau dan antarkabupaten, serta meningkatkan kapasitas ekonomi lokal melalui kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap kelompok.

Kuadran I (Kota Kupang, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Lembata, Sumba Tengah, dan Manggarai Barat): lakukan diagnosis arah deviasi terlebih dahulu. Untuk wilayah dengan PDRB per kapita di atas provinsi, perlu didorong spread effect melalui konektivitas, rantai pasok, dan kemitraan antardaerah; sedangkan wilayah yang berada jauh di bawah provinsi memerlukan penguatan produktivitas sektor unggulan dan layanan dasar.

Kuadran II (Nagekeo, Alor, Manggarai, Sabu Raijua, dan Sumba Timur): perkuat infrastruktur penghubung produksi-pasar, kualitas SDM, digitalisasi UMKM, serta akses pembiayaan agar wilayah berpotensi tumbuh menjadi pusat ekonomi sekunder tanpa membentuk polarisasi baru.

Kuadran III dan IV: pertahankan pemerataan melalui investasi layanan dasar, konektivitas, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, serta usaha lokal. Pemerintah juga perlu membangun sistem pemantauan ketimpangan yang mengintegrasikan PDRB per kapita, IPM, kemiskinan, TPT, dan data geospasial agar perubahan posisi wilayah dapat dievaluasi secara periodik.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini konsisten dengan Mbura & Ginting (2025) dalam menunjukkan posisi Kota Kupang yang sangat berbeda dibandingkan kabupaten lain di NTT. Perbedaannya, penelitian ini membatasi analisis pada data 2024 dan menggunakan klasifikasi empat kelompok berbasis kuartil untuk memperjelas posisi relatif seluruh wilayah. Temuan juga melengkapi Alfiansyah & Budyanra (2020), yang menggunakan Indeks Jaime Bonet dan regresi data panel untuk menganalisis ketimpangan kabupaten/kota NTT periode 2013–2017. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terutama berada pada transparansi pemetaan *cross-sectional* dan penyajian tabel lengkap nilai individual, bukan pada analisis kausal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis hanya menggunakan data *cross-sectional* tahun 2024 sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan tren atau perubahan ketimpangan antartahun. Kedua, penelitian

bersifat deskriptif dan tidak melakukan uji statistik inferensial maupun estimasi kausal. Ketiga, penggunaan PDRB per kapita ADHB membuat hasil masih dipengaruhi perbedaan tingkat harga dan tidak menggambarkan perubahan riil dari waktu ke waktu. Keempat, Indeks Bonet hanya menangkap deviasi relatif PDRB per kapita dan belum merepresentasikan dimensi pembangunan lain seperti IPM, kemiskinan, akses layanan, atau kualitas infrastruktur. Kelima, batas kuadran berbasis kuartil bersifat spesifik terhadap distribusi 22 wilayah pada tahun 2024; jika tahun atau cakupan wilayah berubah, nilai batas harus dihitung ulang. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data panel multi-tahun, PDRB per kapita harga konstan, indikator multidimensi, serta metode spasial untuk menguji keterkaitan antardaerah.

5. Kesimpulan

Pemetaan ketimpangan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi NTT tahun 2024 dengan Indeks Bonet menunjukkan adanya perbedaan relatif yang substansial. Kota Kupang mencatat deviasi tertinggi sebesar 1,67, disusul Manggarai Timur sebesar 0,41, sedangkan Belu memiliki nilai terendah sebesar 0,04. Dengan klasifikasi berbasis kuartil ($Q1 = 0,1275$; $Q2 = 0,2350$; $Q3 = 0,3075$), enam wilayah masuk Kuadran I, lima wilayah Kuadran II, lima wilayah Kuadran III, dan enam wilayah Kuadran IV. Klasifikasi tersebut merupakan alat pemetaan deskriptif; nilai indeks yang tinggi menunjukkan besarnya deviasi PDRB per kapita dari nilai provinsi dan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa suatu wilayah lebih maju atau lebih tertinggal.

Implikasi kebijakan utama adalah perlunya strategi pembangunan yang terdiferensiasi dan berbasis wilayah. Pemerintah perlu memperkuat penyebaran manfaat pertumbuhan dari pusat ekonomi, meningkatkan konektivitas antarpulau, memperkuat produktivitas sektor unggulan lokal, dan mengintegrasikan Indeks Bonet dengan indikator IPM, kemiskinan, pengangguran, serta infrastruktur. Dengan demikian, keputusan prioritas tidak hanya bertumpu pada satu ukuran ekonomi, tetapi pada gambaran pembangunan yang lebih multidimensi dan berkeadilan spasial.

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas periode observasi menjadi data panel, menggunakan PDRB per kapita harga konstan, serta menerapkan analisis spasial dan inferensial untuk menguji determinan dan keterkaitan ketimpangan antardaerah. Pemerintah daerah juga disarankan melakukan pemetaan secara berkala agar perubahan posisi relatif setiap kabupaten/kota dapat dipantau dan digunakan dalam evaluasi kebijakan pembangunan regional.

Referensi

- Adryawning, V. A., & Widiyanto, D. (2025). Analisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan wilayah di Indonesia. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1), 210-232. <https://doi.org/10.20961/region.v20i1.86894>
- Alfiansyah, H., & Budyanra, B. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 424-429. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.26>

- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022). Determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1-16. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2025). *Persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur September 2024 turun menjadi 19,02 persen*. Berita Resmi Statistik, 15 Januari 2025. <https://ntt.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/1400/persentase-penduduk-miskin-provinsi-nusa-tenggara-timur-september-2024-turun-menjadi-19-02-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2024*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Bonet, J. (2006). Fiscal decentralization and regional income disparities: Evidence from the Colombian experience. *The Annals of Regional Science*, 40(3), 661–676. <https://doi.org/10.1007/s00168-006-0060-z>
- Finuliyah, F., & Khusaini, M. (2022). Pendapatan asli daerah, belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 18-28. <https://doi.org/10.21776/jdess.2022.01.1.3>
- Holivil, E. (2024). Ketimpangan ketenagakerjaan dan dinamika kemiskinan di NTT: Analisis faktor penyebab dan implikasi kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(2), 203–226. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i2.374>
- Imsar, I., & Zaman, M. Q. (2024). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 14(2), 42-48. <https://dx.doi.org/10.35448/jequ.v14i2.30143>
- Insani, A., Nanda, F., & Rohanah, S. N. (2025). Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(10), 626-632. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i10.6895>
- Loda, A. E., Nyoman, I., & Yasa, M. (2024). Determinants of Economic Growth and Poverty Levels of Districts/Cities in East Nusa Tenggara Province. *International Research Journal of Economics and Management Studies*, 3(8), 16-29. <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I8P103>
- Marpaung, T. A., Daei, M. I., Habibi, D., & Harahap, N. (2024). Strategi Pembangunan Nasional Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 317-334. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i1.986>
- Mbura, C. R., & Ginting, C. P. (2025). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2024. *Jurnal Statistika Terapan*, 5(1), 21–35. <https://doi.org/10.64930/jstar.v5i1.113>
- Puspita, D., & Imsar, I. (2025). Analisis pertumbuhan ekonomi regional dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(8), 513-520. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i8.6286>
- Raharti, R., Laras, T., & Oktavianti, O. (2021). Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 257-270. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.2422>

- Ramadhani, A., Laura, P., Diangera, T. N. A., Wahyudi, R., Pratiwi, R. S., Saputra, F. E. D., ... & Kusuma, F. A. (2025). Dinamika Dan Ketimpangan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Asas Desentralisasi Antar Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(12), 301-310. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i12.7465>
- Sabaha, A., Hanum, K. F., Mumtaz, A., Amilia, L., Rajan, G., Fadhilah, M. F., ... & Desmawan, D. (2025). Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah: Studi Kasus Kota Tangerang Dan Kabupaten Pandeglang. *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 37-42. <https://doi.org/10.59086/jeb.v4i1.698>
- Sugiasuti, R. H., & Pratama, M. R. (2022). Dampak buruk pembangunan tanpa pemerataan: Kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. *Profit: Jurnal Adminitrasi Bisnis*, 16(1), 79-90. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2022.-16.01.8>
- Tahir G, M., Tinri, M. D. N., & Anas, F. (2025). Ketimpangan sosial dan akses terhadap teknologi: Dampaknya terhadap mobilitas sosial masyarakat di Kota Makassar. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2), 9-14. <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol4.Iss2.1363>
- Wahyudi, W. (2023). Pengeluaran Pemerintah Provinsi Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sebatik*, 27(2), 708-715. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2369>
- Zasriati, M. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Tahun 2010-2020. *Al Dzahab*, 3(2), 119-131.